

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik (Yogyakarta: UGM Press, 2021).

Baladewa Mahesa Putra dan Misbah Muna Fadhilah, *"Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik Pemerintah Desa,"*

Deden Nasihin, Ferri Wicaksono, Susilawati, Heriasman, dan Metty Triantika, *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan* (CV Intelektual Manifes Media, 2026).

Denny Andriana, "Akuntabilitas Publik" (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024).

Ferizaldi, Depita Kardiati, dan Yuli Santri Isma, Keuangan Negara dalam Perspektif Administrasi Publik (Depok dan Sleman: Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM Indonesia), 2026).

Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", Mataram University Press, (2020).

Muhammad Rais Rahmat Razak, dkk., Buku Referensi Tata Kelola Beras Berkelanjutan: Transparansi, Partisipasi, dan Penguatan Ekonomi Daerah Melalui Kemitraan (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2025).

Rudy, "buku ajar Hukum Pemerintahan Desa", Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja: (2022).

Syah Abadi Mendrofa dkk., *Good Governance* Melalui Publik Digital (Mega Press Nusantara, 2024).

Wijaya, dkk., Buku Ajar *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik), (Demak, Jawa Tengah: Pustaka Magister, 2018).

B. Jurnal

Aida Fitriani, "Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah", Fokus, Vol. 20, No. 1, Maret 2022.

Andryan, Implementasi Prinsip *Good Governance Responsivitas* Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Penerapan Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial (Skripsi, Universitas Medan Area, 2023).

Anggun Puji Nur Fadila dan Dyah Pravitasari, "Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Upaya Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas di Desa Tanggunggunung Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung," Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT), Vol. 2, No. 3, Maret 2025.

Apifah Hairunnisa et al., "Dinamika Penegakan Hukum Dalam Masyarakat: Telaah Sosiologi Hukum Terhadap Kesenjangan Antara Hukum Normatif

Dan Hukum Empiris Di Indonesia,” PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora 4, no. 5 (2025): 7969, <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i5.11201>.

Arifin Muksin dkk., "Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan", Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol. 6, No. 2, 2023.

Arif Rizki Puji Nur Wahyudi dan Abdul Basid, “Status Aparatur Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” Jurnal Duta Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Vol. 2, No. 1, 2025.

Ashar Abdillah, Umirul Ham, dan Faiz Fakruddin, “Kajian Undang- Undang Desa Tahun 2024: Narasi Perubahan,” Verdict: Journal of Law Science, Vol. 4, No. 2, 2025.

Dedeng Yusuf Maolani dkk., “Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia,” Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 21, No. 2, 2023.

Dwi Indah Armaningsih, "Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa", Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 10, No. 7, 2021.

Hanantyo Sri Nugroho, "Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Desa Sukadiri Kabupaten Tangerang)", JSPG: Journal of Social Politics and Governance, Vol. 1, No. 2, 2019.

Innesa Destifani, Suwondo, dan Ike Wanusmawatie, "Pelaksanaan Kewenangan Desa dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa (Studi pada Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora)," Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2013.

Jhony K. Yoppy, Risno Mina, dan Firmansyah Fality, "Keterbukaan Informasi Publik terhadap Penggunaan Dana Desa sebagai Upaya Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa", Jurnal Hukum Samudra Keadilan (JHSK), Vol. 16, No. 2, Juli–Desember 2021.

Krishno Hadi, Iradhad Taqwa Sihidi, dan Mariano Werenfridus, "Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan APBDes di Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019", Sawala: Jurnal Administrasi Negara, Vol. 10, No. 1, Juni 2022.

Nurazhimah Ali dan Syarifah Zulayka Riferi Rozi, “Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik sebagai Pilar Demokrasi

di Indonesia,” Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 05, No. 01 (2026).

Rahmiati, Glenn Andrenossa, dan Ridu Meldawati Br. Siringo-ringo, "Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)", *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, Vol. 8, No. 6, 2025.

Roberthus Setyanto, Siti Ridloah, dan Andina Suryasari, "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang," *Jurnal Magister Manajemen Unram*, Vol. 11, No. 3, Agustus 2022.

Silvana Lindri Yani, "Alokasi Dana Desa dalam Mendukung Kebijakan Desa di Kabupaten Sidoarjo", *Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 3, 2023.

Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 3, Agustus 2019.

Titiek Arafiani Ruray dan Saina M. Nur, "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus pada Desa Maitara Tengah Kota Tidore Kepulauan", *KAMBOTI: Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1, 2021.

Zahro Nilna syifa, dkk, "Faktor- Faktor Pendukung Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa", *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, Vol.1, No.3 Juli 2023.

Geges Idhiana Mar'ah, Rosi Malinda, dan Shelly Dwi Pramesta, "Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa di Indonesia, “: *Jurnal Hukum Tata Negara* 1, No.1 (2022).

Komang wila damayanti, Deli Bunga Sarasvitha, Kedudukan Peraturan Desa(PERDES) Dalam Sistem Hukum Indonesia, Vol 16 No. 2 Desember 2022: 130-139.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 beserta perubahannya tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

Peraturan Desa Tegalwaru Nomor 04 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026.

D. Website

Informasi Publik: Pentingnya Transparansi dalam Pemerintahan dan Masyarakat.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-makassar/baca-artikel/17385/Informasi-Publik-Pentingnya-Transparansi-dalam-Pemerintahan-dan-Masyarakat.html>. Diakses pukul 12.30, pada tanggal 3 Juli 2026.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Dana Desa untuk Desa Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputar Dana Desa), Cet. I, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2016).

Redaksi, "Mantan Kades Tegalwaru dan Bendahara Desa Mangkir Panggilan Kajari Jember", Utusan Indo, 1 April 2021, diakses dari <https://utusanindo.com/2021/04/01/mantan-kades-tegalwaru-dan-bendahara-desa-mangkir-panggilan-kajari-jember/>, pada 19 Mei 2026

Website PPID Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

Website PPID Desa Tegalwaru Kecamatan Mayang Kabupaten Jember